

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu organisasi yang dimiliki serta dioperasikan yang berlandaskan asas kekeluargaan atau dengan kata lain dari anggota untuk anggota. Sesuai dengan Undang-undang tentang perkoperasian Pasal 1 ayat 1 No. 25 tahun 1992 yang mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkembangan koperasi sekarang sudah banyak berkembang dikalangan masyarakat Indonesia, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya koperasi maka persaingan antar koperasi juga semakin ketat dalam mencari konsumen. Koperasi menjadi pilihan lain bagi konsumen yang tidak mau meminjam di Bank, untuk itu koperasi kini menjadi alternatif lain bagi konsumen yang ingin meminjam modal dengan sistem yang berbeda.

Koperasi yang saat ini mulai berkembang juga adalah koperasi syariah, koperasi syariah memiliki beberapa fungsi dan peran diantaranya adalah membangun dan mengembangkan kemampuan anggota, memperkuat kualitas sumber daya anggota, berusaha untuk mewujudkan

dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, dan menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sholihin, 2010:424).

Salah satu koperasi syariah yang masih aktif yaitu Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur yang tersebar di Kota/Kabupaten Malang, agar pelayanan anggota lebih optimal saat ini KANINDO Syariah sudah memiliki 13 Cabang yaitu 11 Kantor Kabupaten Malang, 1 Kantor Kota Malang, dan 1 Kantor Kota Batu. Perkembangan jumlah anggota dan calon anggota KANINDO Syariah Jawa Timur setiap tahunnya juga mengalami perkembangan. Data perkembangan jumlah anggota dan calon anggota KANINDO Syariah Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Anggota dan Calon Anggota KANINDO Syariah Jawa Timur Tahun 2013-2015

Keterangan	2013	2014	2015
Anggota	915	1098	2.184
Calon anggota	15.214	16.736	18.145

Sumber : Koperasi Agro Niaga Indonesia 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah anggota dan calon anggota KANINDO Syariah Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu KANINDO Syariah Jawa Timur merupakan salah satu pelopor

berdirinya koperasi syariah di Malang Raya. Hal tersebut dilihat dari perkembangan usaha yang sangat pesat pada KANINDO Syariah Jawa Timur.

Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur yang berada di Dau Kabupaten Malang. KANINDO Syariah Jawa Timur ini mempunyai 2 produk dan layanan yaitu tabungan dan pembiayaan. Tabungan meliputi Simpanan Harian, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Aqiqah, Simpanan Haji, Simpanan Walimah, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Berjangka. Pembiayaan meliputi Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah. Data jumlah kredit yang disalurkan dapat dilihat pada keterangan Tabel 1.2

Tabel 1.2. Data Jumlah Kredit yang Disalurkan KANINDO Syariah Jawa Timur Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah kredit bermasalah	Jumlah kredit yang disalurkan	NPL
2015	550.110.956	31.256.304.343	1,76%
2016	422.019.030	29.306.877.144	1,44%

Sumber : Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa timur 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 menggambarkan bahwa jumlah kredit yang bermasalah tahun 2015 lebih banyak dari pada tahun 2016 sehingga NPL Pada tahun 2015 juga lebih tinggi 1,76% dari pada tahun 2016 yaitu 1,44%. Tahun 2016 jumlah yang kredit yang disalurkan lebih sedikit adalah karena kebijakan dari pihak manajemen KANINDO Syariah Jawa Timur untuk mengurangi adanya kredit bermasalah serta menganggap

kebutuhan dana untuk masyarakat sudah terpenuhi. KANINDO Syariah Jawa Timur juga dapat tetap mempertahankan tingkat NPL rata-rata dibawah 5% tiap tahunnya. Hal tersebut karena kebijakan penyaluran kredit yang terarah dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat.

Alur dalam pengajuan kredit pada KANINDO Syariah Jawa Timur yaitu anggota pertama harus datang ke kantor KANINDO untuk permohonan pengajuan kredit dengan mengisi surat permohonan kredit (SPK) dengan syarat yang telah ditetapkan. kemudian dilakukan pengecekan data oleh pihak KANINDO serta *survey* untuk memastikan bahwa data yang anggota berikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. keputusan jumlah kredit yang diambil anggota, dibawah 10 Juta maka kepala cabang dapat langsung memutuskan, diatas 10 juta maka keputusan ada di rapat komite yaitu melalui manager, pengawas, dan pengurus.

Keputusan penyaluran kredit atau melakukan pencairan dana harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, atau biasa dikenal dengan 5C (Fahmi, 2014:15). Analisis ini perlu dilakukan sebagai upaya evaluasi dini untuk mencegah adanya kredit macet yang dapat menimbulkan masalah-masalah pada koperasi serta sebagai bahan pertimbangan pihak KANINDO Syariah dalam mengambil keputusan dalam penyaluran kredit.

Pembiayaan yang dilakukan KANINDO Syariah Jawa Timur tidak jauh dari risiko, risiko yang sering di hadapi yaitu adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan

oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Ismail, 2010 : 123). Kredit bermasalah atau *Non- Performing Loan* (NPL) rendah maka koperasi dapat dikatakan sehat, sebaliknya jika NPL tinggi maka risiko yang dipikul oleh koperasi tinggi.

Pihak KANINDO Syariah Jawa Timur dalam penyaluran kredit harus menghindari kemungkinan adanya kredit bermasalah. Meminimalisir risiko yang akan dihadapi koperasi maka diperlukan suatu kebijakan kredit dalam penyaluran kredit kepada anggota/calon anggota yang ingin mengambil kredit. Kebijakan kredit ini dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada anggota/calon anggota dalam mengajukan kredit.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan tidak terlepas dari kebijakan kredit yang ditetapkan meliputi syarat-syarat dan prosedur penyaluran kredit. Penyaluran kredit tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Kebijakan yang diterapkan KANINDO Syariah Jawa Timur dapat dijadikan bahan dasar dalam mengukur sejauh mana risiko yang akan terjadi dalam penyaluran kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Implementasi dan Kebijakan Kredit Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kredit yang dilaksanakan pada KANINDO Syariah Jawa Timur?
2. Apakah kebijakan penyaluran kredit pada KANINDO Syariah Jawa Timur sesuai dengan prinsip kehati-hatian peraturan Menteri Koperasi nomor 16 tahun 2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kredit pada KANINDO Syariah Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit pada KANINDO Syariah Jawa Timur dengan prinsip kehati-hatian Menteri Koperasi nomor 16 tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi KANINDO Syariah Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan untuk badan pengawas mengenai implementasi kebijakan kredit perusahaan.

- b. Bagi Anggota dan Calon Anggota KANINDO Syariah Jawa Timur
Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh calon debitur sebagai informasi dalam mengajukan pinjaman pembiayaan/kredit.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.